

INTISARI

Kebijakan Relokasi PKL yang ada disekitar jalan Malioboro ke satu tempat yang diberinama Teras Malioboro merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menciptakan keindahan tata ruang Kota dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan diwilayah perkotaan. Upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan perubahan pada PKL Malioboro juga berbentuk penataan PKL. Karena lokasi dan kepemilikan baru mereka sebagai bagian dari toko, usaha informal mengalami pergeseran yang mengubah status mereka dari informal menjadi formal. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sembilan informan yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di Teras I Malioboro dan satu perwakilan manajemen berpartisipasi dalam wawancara mendalam yang menghasilkan data primer. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Reduksi data, visualisasi data, serta verifikasi dan validasi kesimpulan merupakan metode analisis data yang digunakan. Selain itu, triangulasi data melibatkan penilaian keandalan data yang digunakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Teras I Maliboro terbagi pada dampak sosial yaitu : meningkatkan kepedulian terhadap pelanggan, perubahan relasi antara pedangang kaki lima, perubahan kelembagaan pedagang kaki lima, dan meningkatnya Keamanan PKL. Sementara untuk dampak Ekonominya meliputi : Terbatasnya pengembangan usaha PKL, Modal Usaha serta legalitas PKL, Kurangnya kontribusi perekonomian PKL, Penurunan omzet (pendapatan) PKL, Peningkatan kesadaran PKL untuk melek digital, serta Munculnya inovasi produksi dan pemasaran pedagang.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Dampak Sosial Ekonomi, Relokasi

ABSTRACT

The policy of relocating street vendors around Jalan Malioboro to a place called Terrace Malioboro is part of the commitment of the Yogyakarta Special Region Government together with the Yogyakarta City Government to create beautiful city spatial planning and a smooth development process in urban areas. The arrangement of Malioboro street vendors is also a form of the Yogyakarta City government's efforts to carry out transformation for Malioboro street vendors. This transformation includes changes to informal businesses because they are part of the shop ownership, so by being in a new location their status becomes formal. Descriptive qualitative approaches using primary and secondary data sources are used in this study. Nine informants who worked as street vendors in Teras I Malioboro and one management representative participated in in-depth interviews that provided the primary data. This study employed observation, in-depth interviews, and documentation as data gathering methods. Data reduction, data visualization, and conclusion verification and validation are the methods of data analysis that are employed. Additionally, data triangulation involves assessing the reliability of the data used. Based on the findings in the field, the socio-economic impacts of the relocation of street vendors (PKL) in Teras I Malioboro are divided into social impacts, namely: increasing awareness of customers, changes in relations between street vendors, changes in street vendor institutions, and increased security for street vendors. Meanwhile, the economic impact includes: Limited development of street vendors' businesses, business capital and legality of street vendors, lack of economic contribution of street vendors, decreased turnover (income) of street vendors, increased awareness of street vendors to be digitally literate, and the emergence of innovations in production and marketing of traders.

Keywords: Street Vendors, Socioeconomic Impact, Relocation